

Terima Kasih Pengawasan DPRD



Sumber gambar : <https://asset-2.tstatic.net/kaltim/foto/bank/images/20240109-Kepala-Dinas-Pendidikan-dan-Kebudayaan-Disdikbud-Kota-Balikpapan-Irfan-Taufik.jpg>

BALIKPAPAN - Progres pembangunan gedung SMP terpadu yang terletak di kawasan perumahan Balikpapan Regency sudah memasuki tahap akhir dan ditargetkan rampung pada akhir Januari 2024. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan, Irfan Taufik, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada anggota DPRD Kota Balikpapan atas perhatian dan pengawasan yang intens terhadap progres pembangunan sekolah di daerah tersebut.

Dalam pernyataannya, Irfan menyatakan bahwa peran pengawasan dari DPRD memudahkannya dalam membantu pemerintah dalam penyelesaian pembangunan sekolah. "Terima kasih atas kerja keras fungsi pengawasan DPRD," ucap Irfan, Selasa (9/1). Ia juga memastikan bahwa proses pembangunan sekolah tersebut, yang saat ini telah mencapai 92 persen, akan segera diselesaikan. Diharapkan, sesuai dengan kontrak perpanjangan yang telah ditetapkan, pembangunan dapat rampung pada 30 Januari 2024. Dengan optimisme tinggi, Irfan menegaskan bahwa SMP Terpadu Balikpapan Regency akan selesai tepat waktu. Untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024, sekolah ini direncanakan akan menerima antara lima hingga enam kelas. Setiap kelas berpotensi menampung sekitar 20 hingga 30 peserta didik. Selain itu, dalam anggaran perubahan, telah disiapkan alokasi¹ untuk perabotan sekolah. "Setelah progres selesai diisi mebel, kita lakukan rotasi dan mutasi Sumber Daya Manusia (SDM)," tambah Irfan.

Dengan demikian, diharapkan pada tahun ajaran baru 2024, SMP Terpadu Balikpapan Regency sudah siap menerima siswa dan siswi baru dari wilayah Balikpapan Selatan.
(znl)

Sumber berita:

1. Kaltim.tribunnews.com, Pembangunan SMP Terpadu di Balikpapan Regency Hampir Rampung, Mulai Terima Siswa Baru Tahun Ini, 09/01/24
2. Tribun Kaltim, Terima Kasih Pengawasan DPRD, 10/01/24

Catatan:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3 17/2014), DPR mempunyai fungsi :
 - a) legislasi;
 - b) anggaran; dan
 - c) pengawasan.
2. Selanjutnya dalam Pasal 70 ayat (3) UU MD3 17/2014, diatur bahwa fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.

ⁱ Dikutip dari KBBI, yang dimaksud dengan alokasi adalah penentuan banyaknya uang (biaya) yang disediakan untuk suatu keperluan. <https://kbbi.web.id/alokasi>